

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi mikro elektronika telah menciptakan era informasi yang menjadi pilar masyarakat baru, disebut masyarakat informasi (*information society*) (Wiryanto, 2004: 25). Menurut Rogers (1986), masyarakat informasi adalah “suatu bangsa yang mayoritas angkatan kerjanya sudah menjadi pekerja informasi”. Straubhaar dan LaRose (2002: 1-2) menyebutkan bahwa dalam masyarakat informasi pertukaran informasi merupakan aktivitas ekonomi yang utama. Pekerja informasi adalah orang-orang yang pekerjaan pokoknya memproduksi, memproses, atau mendistribusikan informasi (dalam Wiryanto, 2004: 26).

Perputaran produksi, konsumsi, dan distribusi informasi semakin cepat dialami dan dimiliki oleh sistem masyarakat baru yang global dengan didukung oleh ekspansi ekonomi, jaringan sistem informasi global serta disokong oleh teknologi (Wuryanta, 2004: 132). Mobilitas masyarakat semakin tinggi, sehingga faktor efektifitas dan efisiensi menjadi suatu tuntutan. Masyarakat pun turut menuntut peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik di sektor pemerintahan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 sebagai upaya untuk mencapai hal tersebut.

Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* berangkat dari pemikiran tentang pertimbangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan yang diyakini akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Sosiawan, 2008: 1). Akan tetapi, sejak pertama kali instruksi presiden tersebut telah ditetapkan hingga saat ini, indeks *e-government* Indonesia baru mencapai nilai 0,4487 dan berada di posisi 106 dari jumlah total 193 negara yang ikut serta dalam penilaian ini (<http://www.unpan.org/e-government>, diakses 24 Maret 2015). Nilai tersebut berdasarkan survei *E-Government Development Index* (EGDI) 2014 yang mengandung tiga komponen, yaitu *Online Service Index* (OSI), *Telecommunication Infrastructure Index* (TII), dan *Human Capital Index* (HCI). Nilai tersebut juga masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yang menyebutkan indeks *e-government* nasional diharapkan sudah mencapai angka 3,4 (kategori baik).

Lebih khusus lagi, berdasarkan hasil Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) tahun 2012, *e-government* pemerintah daerah Provinsi Lampung masih berada pada golongan klaster tiga. Klaster tiga mengartikan provinsi yang memiliki nilai kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan paling rendah dibandingkan klaster-klaster lain atau rata-ratanya di bawah kelompok yang terbentuk (kelompok klaster 1, 2, dan 4) (Hernikawati, 2013: 67-70). Berdasarkan penilaian tersebut juga, tampak bahwa aspek-aspek sosial yang berkaitan dengan individu belum menjadi fokus dalam pengukuran tersebut.

Sementara berdasarkan hasil analisa penetrasi pengguna internet tahun 2014 di Lampung yang dihimpun oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dilaporkan bahwa dari total jumlah 3,4 juta pengguna internet di Lampung, penetrasi pengguna internetnya adalah 42 persen (<http://www.apjii.or.id/v2/read/article>, diakses 13 Agustus 2015). Selain itu, merujuk pada data *Internet World Stats* edisi Q1 2011, meskipun dari sisi jumlah pengguna internet Indonesia menempati posisi ke-4 di Asia dan ke-2 di ASEAN (*Assosiation of South East Asia Nations*), penetrasi pengguna internet di Indonesia merupakan salah satu yang terendah di negara ASEAN, yaitu 16,1 persen.

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada 2014 didominasi oleh mereka yang berusia 18-25 tahun, yakni sebesar 49 persen dari total 88,1 juta pengguna. Sedangkan kelompok pengguna berusia 20-24 tahun mencapai 15,1 persen dari total pengguna (<http://www.antaraneews.com/berita/348186>, diakses 19 Maret 2015). Kepala Departemen Pendaftaran Internet Nasional APJII, Valens Riyadi, mengungkapkan profil pengguna internet Indonesia tahun 2012 merupakan mereka yang bekerja dengan lama kerja antara satu hingga dua tahun mencapai 53,3 persen dari total pengguna, yang disusul ibu rumah tangga dan pelajar. Tipologi pengguna internet seperti ini menunjukkan ciri masyarakat informasi (Horrigan, 2007 dalam Nurhaida, 2015). Dengan demikian, Provinsi Lampung dan pemerintah daerah di bawahnya mempunyai potensi untuk meningkatkan layanan publik dan mendapatkan manfaat pertumbuhan ekonomi dari implementasi teknologi dalam pemerintahannya (Nurhaida, 2015).

Akan tetapi mengapa kondisi yang demikian terlihat belum menunjang implementasi *e-government* di Indonesia, termasuk di pemerintahan daerah Provinsi Lampung. Padahal dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah Provinsi Lampung, terutama generasi mudanya telah menunjukkan masyarakat informasi, artinya melek teknologi (Nurhaida, 2015). Ini sangat mungkin disebabkan oleh literasi TIK (*ICT Literacy*) SDM di pemerintahan daerah Provinsi Lampung masih rendah. Hasil *Credit Suisse Emerging Consumer Survey* 2011 yang dihimpun oleh lembaga AC Nielsen mengungkapkan bahwa aktivitas penggunaan internet di Indonesia paling besar terletak pada *social network*, yaitu sebesar 46 persen.

Mengadopsi konsep *e-government* membawa perubahan dalam budaya organisasi, yaitu yang berkaitan dengan penyelenggaraan sektor publik dan cara pemerintah berhubungan dengan publik. Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari penerapannya, maka harus didukung oleh SDM di dalamnya, bukan saja ketersediaan infrastruktur. Sebab tidak semua elemen organisasi siap menerima dan mengadopsi perubahan tersebut, ada elemen yang segera mengadopsi karena merasakan manfaatnya, ada elemen yang menolak, dan ada elemen yang terpaksa menerima walaupun sebenarnya dia menolak (Nurhaida, 2015). Proses pengadopsian suatu inovasi berkaitan juga dengan masalah perilaku, yaitu masalah pengetahuan, keyakinan dan motivasi, maka dapat dipahami bila terdapat beragam kesiapan (*e-readiness*) dalam *e-government* (Van Djikk, 2006 dalam Nurhaida, 2015). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana aspek sosial kesiapan teknologi (*e-readiness*) dalam hal ini *ICT Literacy* pegawai di pemerintahan daerah Provinsi Lampung dalam rangka akselerasi *e-government*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti ungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *e-readiness* pegawai pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam rangka akselerasi *e-government* ditinjau dari sisi *ICT Literacy* SDM-nya?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk mengungkapkan *e-readiness* pegawai pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam rangka akselerasi *e-government* ditinjau dari sisi *ICT Literacy* SDM-nya.”

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan pentingnya pengukuran aspek sosial, tidak hanya pengukuran pada ketersediaan infrastruktur, dalam rangka mengakselerasi *e-government*.

2. Manfaat Praktis dan Sosial

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai kondisi *ICT Literacy* pegawai pemerintah daerah Provinsi Lampung, sehingga dapat menjadi bahan rujukan dalam rangka menyusun strategi akselerasi *e-government* dengan lebih baik.